

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Tegal pada triwulan kedua tahun 2024, berbagai faktor internal dan eksternal, baik yang berasal dari tingkat regional, nasional, maupun internasional, mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah ini. Kabupaten Tegal, seperti daerah lain di Indonesia, beroperasi dalam struktur ekonomi terbuka dan berpartisipasi aktif dalam kancan ekonomi global. Hal ini membuat Tegal rentan terhadap perubahan ekonomi global, khususnya karena ketergantungan pada bahan baku impor dan keterkaitan yang erat dengan pasar internasional. Gejala ekonomi dunia, seperti konflik geopolitik antara Blok Barat dan Blok Timur, berpengaruh terhadap harga dan ketersediaan komoditas penting di pasar domestik. Situasi ini menciptakan tantangan yang signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal.

Dampak globalisasi ekonomi dan konflik geopolitik turut menciptakan fluktuasi harga energi dan bahan pokok lainnya. Kebijakan pemerintah terkait energi, seperti pengaturan tarif gas dan minyak bumi, juga berdampak langsung pada biaya produksi dan transportasi di Kabupaten Tegal. Biaya energi yang tinggi berimbas pada harga barang dan jasa yang bergantung pada proses distribusi, seperti komoditas pangan, yang kemudian memengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan tarif energi, dampak kenaikan harga menjadi semakin nyata, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan pengendalian harga yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga barang.

Faktor musiman, seperti hari besar keagamaan, juga menjadi penyebab utama lonjakan harga di Kabupaten Tegal. Tradisi perayaan besar seperti Imlek, Cap Go Meh, Ramadhan, dan Idul Fitri meningkatkan permintaan terhadap bahan makanan pokok, termasuk telur, daging, dan tepung. Peningkatan permintaan ini berkontribusi pada inflasi harga barang secara jangka pendek. Pengaruh dari perayaan-perayaan ini perlu diantisipasi dengan menjaga stabilitas pasokan dan distribusi, agar harga komoditas pokok tetap stabil dan terjangkau. Penguatan stok barang dan pengawasan distribusi dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga selama periode tersebut.

Di sisi lain, anomali cuaca turut memperparah tantangan dalam menjaga stabilitas harga komoditas. Intensitas curah hujan yang tinggi di beberapa wilayah sejak akhir 2023 dan kekeringan di wilayah lain menyebabkan gangguan dalam produksi komoditas penting seperti cabai, bawang merah, dan beras. Kabupaten Tegal yang bergantung pada pasokan dari wilayah lain menjadi rentan terhadap fluktuasi stok dan kenaikan harga. Ketergantungan pada impor untuk komoditas seperti bawang putih juga menjadi tantangan, karena fluktuasi nilai tukar dan keterbatasan pasokan global berdampak pada harga komoditas di pasar lokal. Dalam menghadapi tantangan ini, kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat di Kabupaten Tegal.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Situasi ekonomi makro Kabupaten Tegal pada Triwulan kedua tahun 2024 menunjukkan

tantangan yang kompleks akibat kombinasi faktor internal dan eksternal. Pada skala internasional, dampak ketidakpastian geopolitik dan ketergantungan impor membuat harga komoditas lokal rentan terhadap fluktuasi global. Di tingkat nasional dan regional, kebijakan energi serta perayaan musiman mendorong peningkatan permintaan, yang pada akhirnya memengaruhi kestabilan harga. Sementara itu, perubahan cuaca yang tidak terduga dan kenaikan harga bahan baku seperti pakan ternak semakin menekan stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tegal.

Rekomendasi Pengendalian Inflasi dari hasil analisis Kabupaten Tegal diantaranya adalah :

1. **Penguatan Cadangan Stok dan Ketahanan Pangan Lokal** yakni mengoptimalkan stok pangan lokal melalui kerja sama dengan petani dan distributor di daerah sekitar agar lebih tahan terhadap fluktuasi pasokan dan permintaan;
2. **Diversifikasi Sumber Pasokan** dalam mengurangi ketergantungan pada impor melalui peningkatan produksi lokal dan kemitraan dengan wilayah lain untuk memastikan pasokan komoditas penting tetap stabil;
3. **Kebijakan Subsidi Energi dan Pengendalian Harga di Daerah** dalam memberikan subsidi yang tepat sasaran untuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga komoditas dan biaya energi;
4. **Pengembangan Teknologi Pertanian dan Mitigasi Cuaca Ekstrem** dalam upaya membantu petani untuk beradaptasi dengan teknologi pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca serta mengurangi dampak anomali iklim pada produksi;
5. **Pengawasan Distribusi dan Kebijakan Harga Acuan Lokal** untuk dapat mengawasi distribusi dan harga barang kebutuhan pokok agar kenaikan harga tidak terjadi secara berlebihan serta tetap terjangkau bagi masyarakat.

Melalui langkah-langkah pengendalian ini, Kabupaten Tegal diharapkan dapat lebih tangguh menghadapi gejolak ekonomi makro, baik yang bersumber dari luar negeri maupun yang bersifat domestik. Penguatan ketahanan ekonomi lokal dan strategi adaptif terhadap perubahan eksternal akan membantu menjaga stabilitas ekonomi di daerah.

Secara keseluruhan, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tegal dalam pengendalian inflasi adalah fluktuasi harga musiman, dampak kebijakan harga pusat, ketergantungan distribusi antarwilayah, serta dampak nilai tukar dan biaya produksi. Upaya pengendalian inflasi yang bisa diterapkan adalah dengan memperkuat ketahanan pasokan lokal, meningkatkan stabilitas rantai distribusi, dan memberdayakan sumber daya lokal agar tidak terlalu bergantung pada pasar luar daerah dan komponen impor. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Tegal dapat menekan dampak inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Tegal berdasarkan kepada :

1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor : 050/76 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis;
2. Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 05/75/2022 tentang Peta jalan (*Road Map*)

Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 – 2024 Kabupaten Tegal sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Tegal;

3. Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kabupaten Tegal Mingguan tanggal 05 Februari 2024 tentang Pengendalian Inflasi di Daerah berdasarkan surat undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : A 0604 tanggal 03 Februari 2024;
4. Rapat Koordinasi pengendalian inflasi berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 000.1.5/23/A.0667 tanggal 12 Februari 2024 perihal Rapat Koordinasi Pemenuhan Data Dukung Pengukuran Kinerja TPID Kabupaten Tegal;
5. Rapat Koordinasi TPID Minggu ke-III (*Daring/Zoom Meeting*) berdasarkan Surat Undangan Sekda Kab. Tegal No : 000.1.5/23/A.0782 tanggal 19 Februari 2024 perihal Rapat Koordinasi Pengendali Inflasi Daerah Tahun 2024;
6. Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 000.9/23/B.0373/2024 Tentang Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Menyambut Idul Fitri 1445H/2024M tanggal 26 Maret 2024;
7. Rapat undangan Penanganan Inflasi Nomor : 000.7.3/23/473/2024 pada hari Senin tanggal 20 April 2024 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Upaya Konkrit Pemerintah Daerah dalam Penanganan Inflasi Daerah sebagaimana mendasar pada Surat Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/618/W.KPD/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Upaya Konkrit Pemerintah Daerah dalam Penanganan Inflasi Daerah;
8. Rapat undangan Penanganan Inflasi Nomor : 000.1.5/23/517/2024 pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 tentang Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024;
9. Menghadiri undangan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tentang Kerjasama Antar Daerah (KAD) pada hari Senin , tanggal 20 Mei 2024;
10. Menghadiri rapat koordinasi kegiatan Fasilitasi Penyusunan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Nomor 000.1.6/20/630/VI/2024 pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal;
11. Menyelenggarakan Rapat Penanganan Inflasi terkait Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dengan Tema “Pengamanan Produksi dan Peningkatan Edisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga” Nomor 000.1.5/A.515 pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2024, dalam rangka menindaklanjuti surat Radiogram Kemendagri-RI Nomor 500.2.3/4061/Bangda tanggal 11 Juni 2024;
12. Rapat Penanganan Inflasi dalam rangka menindaklanjuti surat Kemendagri Nomor 500.2.23/2822/SJ tanggal 22 Juni 2024 terkait Upaya Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024;

Secara umum, mayoritas rapat yang dilaksanakan pada Triwulan kedua periode bulan April sampai dengan Juni 2024 melalui zoom dan diikuti secara daring oleh TPID Kabupaten Tegal yang dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Tegal. Rapat daring dipimpin oleh Irjen Kemendagri. Beberapa arahan Pj. Bupati yang disampaikan dalam rapat pada anggota TPID Kabupaten Tegal adalah:

1. Rapat rutin TPID setidaknya sudah dilaksanakan secara bersama-sama di Ruang Rapat Sekda sebulan sekali. Selain itu juga diikuti oleh seluruh anggota TPID dari masing-masing tempat;
2. Jaga inflasi, jangan sampai ada catatan khusus di Kabupaten Tegal, khususnya gejolak harga komoditas;
3. Kabupaten Tegal bukan termasuk dalam daerah yg menjadi lokasi survei Indeks Harga

Konsumen (IHK). Sebagai gantinya, dilakukan survei Indeks Pergerakan Harga (IPH) 20 komoditas sebagai proksi inflasi. Pendataan harga dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, serta akan didampingi oleh BPS untuk meningkatkan kualitas dan validitas harga.

Namun terdapat beberapa rapat yang diselenggarakan berdasarkan mandat dari Kemendagri sebagai upaya tindak lanjut arahan dari Bapak Kemendagri beserta Pimpinan yang mewewakili dari Kementerian/Lembaga/Badan dan tentunya berkepentingan dalam urusan Inflasi. Terdapat 4 rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dan dihadiri bersama dengan Kedinasan dan Forkompinda serta pelaku usaha maupun masyarakat yang turut ikut peran aktif didalamnya.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Perkembangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Tegal pada Triwulan II (periode April hingga Juni) melibatkan upaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi serta menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk menjaga stabilitas harga. Perkembangan utama yang biasanya dilakukan dalam pemantauan dan evaluasi ini, diantaranya dilakukan **Pemantauan Pergerakan Harga Komoditas Utama** harga pada berbagai komoditas penting dipantau secara intensif, termasuk bahan pangan seperti beras, sayuran, telur, daging, serta produk energi seperti BBM dan LPG. Data pergerakan harga ini diperoleh dari pasar-pasar lokal di Kabupaten Tegal untuk mengidentifikasi pola harga dan menentukan adanya lonjakan atau penurunan yang signifikan pada komoditas tertentu. Untuk hasil yang kedua adalah **Proses Pengidentifikasian Pemicu Inflasi**.

Selama Triwulan II, faktor musiman seperti bulan Ramadan dan Idul Fitri biasanya menjadi pemicu utama kenaikan harga bahan pokok. Permintaan yang meningkat selama periode ini sering kali berdampak pada inflasi yang lebih tinggi. Selain itu, cuaca, kondisi pasokan, dan distribusi barang juga dievaluasi karena dapat mempengaruhi stabilitas harga di pasar.

Yang ketiga dapat melihat dan mengevaluasi **Efektivitas Kebijakan Intervensi Pasar** untuk mengendalikan harga, berbagai intervensi pasar seperti operasi pasar murah sering dilakukan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar. Misalnya, subsidi harga pada komoditas tertentu atau penambahan stok untuk memastikan barang-barang esensial tersedia di tingkat harga yang terjangkau. Kemudian yang keempat adalah **Menganalisis Dampak Kebijakan Transportasi dan Distribusi** Kebijakan yang berhubungan dengan transportasi dan distribusi, seperti perbaikan infrastruktur dan regulasi distribusi, juga diperiksa karena masalah di sektor ini dapat mempengaruhi harga barang-barang tertentu. Pada periode April-Juni, adanya gangguan distribusi atau biaya transportasi yang meningkat dapat berdampak langsung pada harga komoditas.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pemantauan pada tahapan hasil Hasil Evaluasi dan Rekomendasi yang dilakukan selama periode ini, tim pemantauan inflasi menyusun laporan yang memuat tren inflasi, analisis penyebabnya, dan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Hasil evaluasi

digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan lebih lanjut, seperti memperkuat operasi pasar, memberikan insentif pada sektor pertanian lokal untuk meningkatkan pasokan, atau mengupayakan koordinasi yang lebih erat dengan instansi terkait. Rekomendasi yang kedua adalah dukungan sosial ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada bantuan langsung atau subsidi. Kebijakan ini merupakan bagian daripada tindak lanjut kebijakan yang berasal dari pusat yang notabene diterapkan pada kelompok masyarakat rentan uang terdampak langsung atas kenaikan harga. Hal ini memastikan daya beli tetap terjaga dan mengurangi dampak langsung inflasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan II bertujuan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menyiapkan tindakan korektif yang lebih cepat di triwulan selanjutnya, agar ketahanan ekonomi di Kabupaten Tegal tetap terjaga dan inflasi tidak membebani masyarakat.